

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, 2016, *Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2016*, Disdukcapil Kabupaten Karangasem, Karangasem.
- Direktorat Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010, *Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik*, Jakarta.
- Domai, Tjahjanulin, 2005, *Dari Pemerintahan Ke Pemerintahan Yang Baik*, Depdagri, Jakarta.
- Fahmal, Muin, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Jakarta.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.R., Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., et.al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan Pertama*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI, Jakarta.

- Iskandar, 2016, *Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, AndiPublisher, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Dodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Krina, Lalolo, 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. BAPPENAS (Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik) Jakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Situmorang, Victor, Cormentyna Sitanggan, 1996, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan administrasi Negara dan Upaya Administraif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- MM Billah, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta.
- Mucshan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan TUN di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy Hendrikus T. Gedeona, dkk, 2016, *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, “Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Masyarakat”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2017, *Laporan Tahunan 2016*, Penerbit Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.

- Poltak Sinambela, Lijan dkk., 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prawirohardjo, Soewargono, 1993, *State of the Art Dari Ilmu Pemerintahan, Karya Dharma IIP*, Jakarta.
- Ratmino, Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model*, Jakarta.
- _____, 2005, *Manajemen Pelayanan ; Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1984, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cetakan ke 19, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sulastio, Bernan Steny, dkk, 2008, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Trans Publishing, Malang.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 13, Rajawali Pers, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

United Nations Development Programme, 1999, *Decentralization: A Sampling of Definitions*, Joint UNDP Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Etika Hubungan Legislatif – Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung.

B. JURNAL

Raharjo Jati, Wasisto, “Inkonsistensi Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Sentralisasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012.

Rasul, Sjahrudin, “Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2009.

Safaruddin Harahap, Irwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Juni, 2016.

Siti Maryam, Neneng, “Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume VI, Nomor 1, Juni, 2016.

Sugiyanto, “Mengukur Kinerja Kebijakan Publik” (Pertanyaan Korelasional Terhadap Aktualisasi *Good Governance*)”, *Jurnal Good Governance*, Volume 3, Nomor 1, Mei, 2004.

Susanto, Eli, “Otonomi Daerah dan Problematikanya Dalam Pembaharuan Birokrasi Daerah”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Program Magister Publik UGM, Volume 6, Nomor 1, Pebruari, 2002.

Suwarni, Sri, “Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul”, *Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010.

Wiliandri, “Administrasi Kependudukan Kota Padang”, *Jurnal Teknologi dan Informasi Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1, Maret, 2011.

C. SKRIPSI, TESIS DAN DESERTASI

Annisa Santi, Rodya, 2013, Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Terhadap Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Febrianda, Lis, 2009, Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mali, Emiliana Laku, 2011, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan", *Tesis*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Mukti Maulana, Ari, 2009, Pelaksanaan *Citizen Charter* dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pelayanan Catatan Sipil Di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2).

E. INTERNET

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, "Data Kependudukan Kabupaten Karangasem Semester I Tahun 2016", <http://disdukcapil.karangasemkab.go.id>, diakses tanggal 3 April 2017 Pukul 12.10 WIB.